



KABUPATEN DHARMASRAYA

Pulau Punjung, 19 Januari 2026 M
30 Rajab 1447 H

Nomor : 000.8.5/ 60 /Setda-Org/I-2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Pemetaan
Ulang Sekretariat Daerah**

Yth. Bapak Gubernur Sumatera Barat
Cq. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah
Di
Padang

Dalam rangka penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan pemetaan ulang terhadap variabel Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, bersama ini terlampir kami kirimkan bukti dukung pemenuhan varibel umum dan variable teknis pemetaan intensitas urusan pemerintahan dan pembentukan beban kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya, kiranya Bapak Gubernur dapat memberikan rekomendasi dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**a.n. BUPATI DHARMASRAYA
Pj. SEKRETARIS DAERAH,**



JASMAN

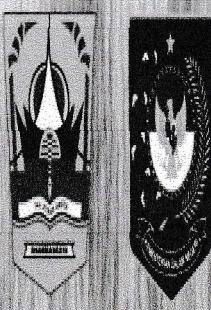
Tembusan :
1. Bupati Dharmasraya;
2. Ketua DPRD Kabupaten Dharmasraya.

Lampiran surat :

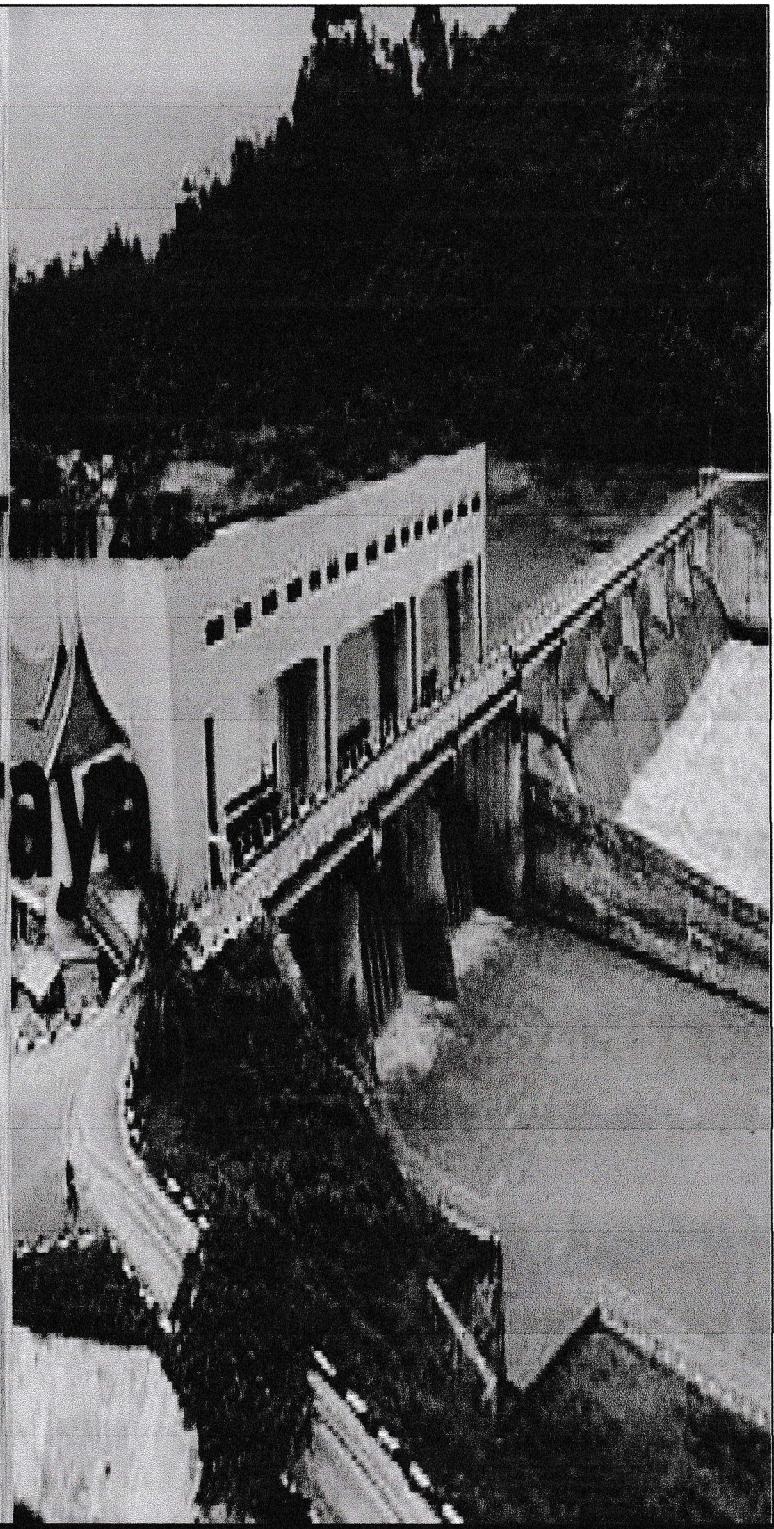
Nomor : 000.8.5/ 60 /Setda-Org/IX-2026
Tanggal : 19 Januari 2026
Perihal : **Permohonan Rekomendasi Pemetaan Ulang Sekretariat Daerah**

**PEMETAAN FUNGSI STAF
(SEKRETARIAT DAERAH)**

No	INDIKATOR	NILAI	SKALA	BOBOT (%)	SKOR
A	Faktor Umum (20%)				
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	244.032	600	10	60
2	Luas Wilayah (km ²)	2.961	1000	5	50
3	Jumlah APBD (Rp)	1.032.845.576.718	1000	5	50
B	Faktor Teknis (80%)				
1	Faktor Kecamatan	11	600	15	90
2	Jumlah desa/ Kelurahan	52	400	5	20
3	Jumlah Perangkat Daerah	26	400	20	80
4	Jumlah Kebijakan Daerah (Perda/Perkada yang masih berlaku)	489	1000	15	150
5	Jumlah Pegawai ASN pada Instansi Pemerintah Kabupaten	6326	600	10	80
6	Jumlah APBD Kabupaten (RP)	1.032.845.576.718	1000	15	150
SKOR					730
FAKTOR PENGALI (KESULITAN GEOGRAFI)					1,1
TOTAL SKOR					803
TIPOLOGI					A



Buku DAK Semester I Tahun Ajaran
Kabupaten
Dharmasraya



KATA PENGANTAR



Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengamanatkan bahwa Data Kependudukan Skala Provinsi diterbitkan secara berkala per semester, yaitu untuk semester 1 (satu) per 30 Juni dan semester 2 (dua) per 31 Desember.

Data Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dipergunakan untuk perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.

Data Kependudukan yang disusun Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini adalah data kependudukan hasil pelayanan administrasi kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota yang dilakukan setiap saat dengan mempergunakan aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Data Kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan telah teruji ketunggalannya melalui perekaman sidik jari dan iris mata, sehingga kualitas data dapat lebih terjamin.

Data hasil pelayanan tersebut kemudian dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sehingga menjadi Data Konsolidasi Bersih (DKB).

Data Kependudukan ini disusun berdasarkan Kabupaten/Kota untuk Semester I Tahun 2025, secara resmi sudah dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan oleh lembaga pemerintah/non pemerintah ataupun lembaga lainnya lingkup Kabupaten Dharmasraya.

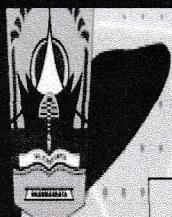
Akhir kata, kami berharap semoga buku Data Kependudukan Kabupaten Dharmasraya Semester I Tahun 2025 ini bermanfaat untuk semua pihak.

Dharmasraya, 2025

Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Dharmasraya



* MARCO ANDRIAS, S. IP, M.M
Penjabat Utama Muda
NIP. 198806032007011001



BERDASARKAN JENIS KELAMIN
KABUPATEN DHARMASRAYA

KODE	KECAMATAN	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)		TOTAL
		PRIA	WANITA	
1	2	3	4	5
13.10.02	PULAU PUNJUNG	24,658	23,728	48,386
13.10.04	SITIUNG	15,363	14,708	30,071
13.10.06	TIMPEH	9,493	9,173	18,666
13.10.08	TIUMANG	7,064	6,952	14,016
13.10.10	ASAM JUJUHAN	5,025	4,615	9,640
	JUMLAH	123,899	120,133	244,032

JUMLAH PENDUDUK KABUPATEN DHARMASRAYA PER NAGARI
KONDISI 30 JUNI 2025

NO	KECAMATAN	NAGARI	JUMLAH PENDUDUK			Jumlah KK
			L	P	L+P	
13.10-DHARMASRAYA			123.899	120.133	244.032	76.746
1	01-KOTO BARU		17.419	17.329	34.748	11.129
		2002-KOTO BARU	7.422	7.543	14.965	4.652
		2003-SIALANG GAUNG	3.902	3.768	7.670	2.605
		2005-AMPANG KURANJI	2.569	2.596	5.165	1.701
		2008-KOTO PADANG	3.526	3.422	6.948	2.171
2	02-PULAU PUNJUNG		24.658	23.728	48.386	14.621
		2001-SUNGAI DAREH	4.461	4.347	8.808	2.633
		2002-TEBING TINGGI	2.072	2.069	4.141	1.336
		2006-EMPAT KOTO PULAU PUNJUNG	5.281	5.022	10.303	3.105
		2007-SUNGAI KAMBUT	5.195	5.017	10.212	3.017
		2008-GUNUNG SELASIH	2.362	2.226	4.588	1.370
		2009-SIKABAU	5.287	5.047	10.334	3.160
3	03-SUNGAI RUMBIAI		12.307	11.832	24.139	7.338
		2003-SUNGAI RUMBIAI	3.093	2.972	6.065	1.748
		2004-KURNIA KOTO SALAK	2.612	2.564	5.176	1.624
		2007-SUNGAI RUMBIAI TIMUR	2.240	2.240	4.480	1.264
		2008-KURNIA SELATAN	4.362	4.056	8.418	2.702
4	04-SITIUNG		15.363	14.708	30.071	9.525
		2001-SITIUNG	4.299	4.089	8.388	2.708
		2002-SIGUNTUR	3.256	3.006	6.262	1.904
		2004-GUNUNG MEDAN	3.886	3.796	7.682	2.318
		2005-SUNGAI DUO	3.922	3.817	7.739	2.595
5	05-SEMBILAN KOTO		4.996	4.920	9.916	2.981
		2001-SILAGO	1.030	1.036	2.066	623
		2002-LUBUK KARAK	682	691	1.373	426
		2003-KOTO NAN EMPAT DI BAWUH	1.551	1.531	3.082	903
		2004-BANAI	1.733	1.662	3.395	1.029
6	06-TIMPEH		9.493	9.173	18.666	5.992
		2001-TIMPEH	621	598	1219	388
		2002-TARATAK TINGGI	3.180	3.021	6201	2.011
		2003-TABEK	2.427	2.366	4793	1.494
		2004-PANYUBARANGAN	2.048	1.974	4022	1.336
		2005-RANAH PALABI	1.217	1.214	2431	763
7	07-KOTO SALAK		9.406	9.267	18.673	6.285
		2001-KOTO SALAK	1.980	2.016	3.996	1.395
		2002-AMPALU	1.536	1.541	3.077	1.009
		2003-PADUKUAN	1.988	1.892	3.880	1.360
		2004-PULAU MAINAN	2.309	2.206	4.515	1.466
		2005-SIMALIDU	1.593	1.612	3.205	1.055
8	08-TIUMANG		7.064	6.952	14.016	4.617
		2001-TIUMANG	2.486	2.458	4.944	1.629
		2002-SUNGAI LANGKOK	1.756	1.747	3.503	1.165
		2003-KOTO BERINGIN	1.173	1.159	2.332	757
		2004-SIPANGKUR	1.649	1.588	3.237	1.066

9	09-PADANG LAWEH		3.696	3.561	7.257	2.214
	2001-PADANG LAWEH		670	682	1.352	410
	2002-BATU RIJAL		1.003	964	1.967	643
	2003-MUARO SOPAN		604	573	1.177	335
	2004-SOPAN JAYA		1.419	1.342	2.761	826
10	10-ASAM JUJUHAN		5.025	4.615	9.640	2.982
	2001-SUNGAI LIMAU		1.154	1.036	2.190	708
	2002-ALAHAN NAN TIGO		1.597	1.491	3.088	947
	2003-LUBUK BESAR		1.017	907	1.924	551
	2004-TANJUNG ALAM		385	385	770	263
	2005-SINAMAR		872	796	1.668	513
11	11-KOTO BESAR		14.472	14.048	28.520	9.062
	2001-KOTO BESAR		735	683	1.418	433
	2002-KOTO TINGGI		1.849	1.833	3.682	1.149
	2003-KOTO GADANG		2.853	2.815	5.668	1.809
	2004-BONJOL		1.309	1.252	2.561	769
	2005-ABAI SIAT		2.910	2.837	5.747	1.791
	2006-KOTO LAWEH		1.917	1.905	3.822	1.272
	2007-KOTO RANAH		2.899	2.723	5.622	1.839





PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH
Jl. Lintas Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Telp. (0754) 40319 Fax. (0754) 40319
Website : <http://www.dharmasrayakab.go.id/mail>

Pulau Punjung, 14 Januari 2026 M
25 Rajab 1447 H

Nomor : 600.3.2 / 23 /BAPPERIDA-2026
Sifat : Biasa
Lampiran : Terlampir
Perihal : Permintaan Data Luas Wilayah Kabupaten Dharmasraya

Kepada Yth.

Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
Cq. Kepala Bagian Organisasi

di-

Tempat

Dengan Hormat,

Memenuhi maksud Surat Pj. Sekretaris Daerah Nomor:000.8.5/52/Setda-Org/I-2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal permintaan data Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya, maka dapat kami sampaikan sebagai berikut ;

Kabupaten Dharmasraya terletak pada posisi $00^{\circ}48'25,367''$ - $1^{\circ}41'40,269''$ LS dan $101^{\circ}8'32,52''$ - $101^{\circ}53'30,168''$ BT. Kabupaten Dharmasraya terletak pada wilayah perbatasan Provinsi Sumatera Barat dengan Provinsi Jambi dan Provinsi Riau yang dilewati jalur Lintas Tengah Sumatera.

Luas wilayah Kabupaten Dharmasraya berdasarkan Perda No. 4 Tahun 2009 yaitu 2.961,13 Km² (296.113 Ha), sedangkan berdasarkan perhitungan terbaru hasil digitasi citra spot 5 Kabupaten Dharmasraya memiliki luas 302.599 Ha. Sementara luas berdasarkan citra 2017 dan diupdate menggunakan data citra tahun 2022 dan telah disesuaikan dengan batas kabupaten yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yaitu 292.120 Ha.

Secara administratif, wilayah Kabupaten Dharmasraya berbatasan dengan:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Sijunjung serta Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.
- Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi.
- Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Bungo dan Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.

- Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Solok dan Kabupaten Solok Selatan Provinsi Sumatera Barat.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama diucapkan terima kasih.

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI
DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA



Frinaldi ST,M.Sc.



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Sumatera Barat
Telp 0754-401161 Fax 0754-401161
www.dharmasrayakab.go.id

Pulau Punjung, 16 Januari 2026 M
26 Rajab 1447 H

Nomor : 900.1.1/1/ji /BKDA/2026
Sifat : Pertinggi
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Penyampaikan Data Jumlah APBD TA. 2026

Kepada

Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
Co. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Nomor: 000.8.5/ 52/Setda-Org/I-2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Permintaan Data yaitu terkait Jumlah APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan hal di atas, dapat kami sampaikan bahwa APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.032.845.576.718,70 (Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2026 terlampir).

Demikian data ini sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.



KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.588.553.694,00
4.1.01	Pajak Daerah	68.560.857.006,00
4.1.02	Retribusi Daerah	78.053.477.219,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.469,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.444.900.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	758.938.426.720,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	719.203.333.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.735.093.720,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.848.601.595,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.748.601.595,00
	Jumlah Pendapatan	928.375.582.009,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	844.543.547.825,70
5.1.01	Belanja Pegawai	539.912.119.586,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.791.162.954,70
5.1.05	Belanja Hibah	11.785.265.285,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	55.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	75.095.072.893,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.397.051.997,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.455.114.660,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.408.306.336,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.382.099.900,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	452.500.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	108.208.956.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.670.507.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.536.449.000,00
	Jumlah Belanja	1.032.845.578.718,70

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-104.469.994.709,70
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	105.969.994.709,70
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	105.969.994.709,70
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembayaran	105.969.994.709,70
	Jumlah Pengeluaran Pembayaran	1.500.000.000,00
	Pembayaran Netto	104.469.994.709,70
6.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkalaan (SILPA)	0,00

Kab. Dharmasraya, 31 Desember 2025

Bupati

ANNISA SUCI RAMADHANI



BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di tujuakn untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dengan telah dilakukannya penataan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

13. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang pertanahan;
 14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
 16. Dinas Pangan dan Perikanan Tipe B menyelegarkan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan;
 17. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 3. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- f. Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan:
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Kecamatan terdiri dari :
1. Kecamatan Asam Jujuhan Tipe A;
 2. Kecamatan Koto Baru Tipe A;
 3. Kecamatan Koto Besar Tipe A;
 4. Kecamatan Koto Salak Tipe A;
 5. Kecamatan Padang Laweh Tipe B;
 6. Kecamatan Pulau Punjung Tipe A;
 7. Kecamatan Sembilan Koto Tipe A;
 8. Kecamatan Sitiung Tipe A;
 9. Kecamatan Sungai Rumbai Tipe A;
 10. Kecamatan Timpeh Tipe A;
 11. Kecamatan Tiumang Tipe A;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5**
- (1) Pada Dinas atau Badan dapat dibentuk UPTD.
 - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 - (3) Kriteria pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah dan UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan secara profesional.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 12 dihapus.

Pasal II

1. Kelembagaan UPTD rumah sakit Daerah yang sudah ada, tetap melaksanakan tugas sampai di tetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Rumah Sakit Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR.....²
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/18/2023)



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2009

TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN NAGARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan sosial kemasyarakatan dan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, di pandang perlu dilakukan pemekaran nagari yang ada di Kabupaten Dharmasraya;
b. bahwa pemekaran nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas adalah merupakan usul dan prakarsa dari masyarakat;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Penataan Nagari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

BAB V
NAGARI SETELAH DIMEKARKAN DAN DITATA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 76

Setelah dilakukan Pemekaran Nagari, Nagari yang sebelumnya berjumlah 21 (dua puluh satu) Nagari menjadi 52 (lima puluh dua) Nagari yang terdiri dari 260 (dua ratus enam puluh) Jorong yang berada dalam 11 (sebelas) Kecamatan.

Bagian Kedua
Nagari Dalam Kecamatan
Paragraf 1
Nagari di Kecamatan Pulau Punjung

Pasal 77

Nagari yang berada dalam Kecamatan Pulau Punjung, terdiri dari 6 (enam) Nagari, yaitu:

- a. Nagari IV Koto Pulau Punjung, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Pulau Punjung;
 2. Jorong Pasar Pulau Punjung;
 3. Jorong Kubang Panjang; dan
 4. Jorong Simpang Pogang.
- b. Nagari Sungai Dareh, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Sungai Kilangan;
 2. Jorong Sungai Sangkir;
 3. Jorong Koto Gadang;
 4. Jorong Ranah; dan
 5. Jorong Padang Candi.
- c. Nagari Sungai Kambut, terdiri dari 6 (enam) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Koto Lamo;
 2. Jorong Sungai Nili;
 3. Jorong Muaro Mau;
 4. Jorong Muaro Momong;
 5. Jorong Lambau; dan
 6. Jorong Sungai Kambut Dua.
- d. Nagari Gunung Selasih, terdiri dari 4 (empat) Jorong, yaitu:
 1. Jorong Kampung Surau;
 2. Jorong Lubuk Bulang;
 3. Jorong Sungai Belit; dan
 4. Jorong Sialang.
- e. Nagari Tebing Tinggi, terdiri dari 5 (lima) Jorong, yaitu:

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, dibentuk Sekretariat Nagari berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jumlah dan tata cara pengisian perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Juli 2009

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. MARLON MARTUA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 2 Juli 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,**

ttd.

**H. BUSRA, S.H.
Pembina Utama Madya
NIP. 410 005 867**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2009 NOMOR 4





BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya di tujuhan untuk mewujudkan kesejateraan masyarakat;
b. bahwa agar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dapat berjalan secara efektif dan efisien, perlu didukung dengan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah serta prinsip penataan organisasi perangkat daerah;
c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta dengan telah dilakukannya penataan Perangkat Daerah, maka Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
 11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya.
 12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya.
 13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Dharmasraya.
 14. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan Sekretariat Daerah Tipe B;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Dharmasraya merupakan Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Dharmasraya merupakan Inspektorat Tipe B;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Dharmasraya, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan;
 2. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kebudayaan, bidang pariwisata, bidang pemuda dan olah raga;
 3. Dinas Kesehatan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 4. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan bidang pengendalian peduduk dan keluarga berencana;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 7. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan mayarakat sub urusan ketentraman dan ketertiban umum dan sub urusan kebakaran;
 8. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
 9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro, serta bidang perdagangan;
 10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe C menyelenggarakan urusan pemerintah bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 11. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, bidang statistik dan bidang persandian;
 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

13. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman serta Pertanahan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman, bidang pertanahan;
14. Dinas Perhubungan Tipe C menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
15. Dinas Lingkungan Hidup Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup;
16. Dinas Pangan dan Perikanan Tipe B menyelegarkan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang perikanan;
17. Dinas Pertanian Tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian; dan
18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tipe C, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan;
- e. Badan Daerah terdiri dari:
1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, penelitian dan pengembangan;
 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tipe C melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
 3. Badan Keuangan Daerah Tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
- f. Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, ditetapkan:
1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tipe C melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- g. Kecamatan terdiri :
1. Kecamatan Asam Jujuhan Tipe A;
 2. Kecamatan Koto Baru Tipe A;
 3. Kecamatan Koto Besar Tipe A;
 4. Kecamatan Koto Salak Tipe A;
 5. Kecamatan Padang Laweh Tipe B;
 6. Kecamatan Pulau Punjung Tipe A;
 7. Kecamatan Sembilan Koto Tipe A;
 8. Kecamatan Sitiung Tipe A;
 9. Kecamatan Sungai Rumbai Tipe A;
 10. Kecamatan Timpeh Tipe A;
 11. Kecamatan Tiumang Tipe A;
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 5**
- (1) Pada Dinas atau Badan dapat dibentuk UPTD.
 - (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 - (3) Kriteria pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pembentukan UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur.

4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selain UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) terdapat UPTD di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan Daerah dan UPTD di bidang kesehatan berupa rumah sakit Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus serta pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan secara profesional.
- (2) Satuan pendidikan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.
- (3) Sebagai unit organisasi bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rumah sakit Daerah memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian.

5. Pasal 10 dihapus.

6. Pasal 12 dihapus.

Pasal II

1. Kelembagaan UPTD rumah sakit Daerah yang sudah ada, tetap melaksanakan tugas sampai di tetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan UPTD Rumah Sakit Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 April 2023

BUPATI DHARMASRAYA,

SUTAN RISKA

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 12 April 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA,

ADLISMAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023 NOMOR.....²
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT : (1/18/2023)



BUPATI DHARMASRAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 12 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DHARMASRAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka dipandang perlu membentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 November 2010

BUPATI DHARMASRAYA,

ttd.

H. ADI GUNAWAN

Diundangkan di Pulau Punjung
pada tanggal 26 November 2010

SEKRETARIS DAERAH,

ttd.

H. BUSRA, SH
Pembina Utama Madya
NIP. 19540204 198003 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010 NOMOR 12



**PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
YANG MASIH BERLAKU TAHUN 2005-2025**

PERATURAN DAERAH 2005-2025			
NO	NOMOR/TAHUN & TGL	TENTANG	KETERANGAN
TAHUN 2005			
1	Nomor 1 Tahun 2005 (3 Januari 2005)	LAMBANG DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
2	Nomor 2 Tahun 2005 (1 Maret 2005)	KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 dan dicabut sebagian yang Mengatur Hak Keuangan & Administratif oleh Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2017
3	Nomor 3 Tahun 2005 (1 Maret 2005)	KEDUDUKAN KEUANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DHARMASRAYA	-
4	Nomor 10 Tahun 2005 (5 September 2005)	PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALET	-
TAHUN 2006			
5	Nomor 2 Tahun 2006 (9 Oktober 2006)	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK	-
6	Nomor 5 Tahun 2006 (14 Desember 2006)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2005 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 dan Dicabut sebagian dengan Peraturan daerah Nomor 5 Tahun 2017
TAHUN 2007			
7	Nomor 8 Tahun 2007 (22 Januari 2007)	SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
8	Nomor 20 Tahun 2007 (22 Januari 2007)	BANGUNAN GEDUNG	-
TAHUN 2008			
9	Nomor 2 Tahun 2008 (5 Mei 2008)	PEMERINTAHAN NAGARI	-
10	Nomor 3 Tahun 2008 (5 Mei 2008)	PENATAAN DAN PEMBENTUKAN KECAMATAN	-
11	Nomor 9 Tahun 2008 (28 Juli 2008)	PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL	-
12	Nomor 11 Tahun 2008 (4 Agustus 2008)	PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PRODUK HUKUM NAGARI	-

TAHUN 2009			
13	Nomor 2 Tahun 2009 (5 Juni 2009)	PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT	Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
14	Nomor 4 Tahun 2009 (2 Juli 2009)	PEMBENTUKAN DAN PENATAAN NAGARI	Mengubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017
TAHUN 2010			
15	Nomor 4 Tahun 2010 (6 Mei 2010)	PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018
16	Nomor 12 Tahun 2010 (26 November 2010)	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	-
TAHUN 2011			
TAHUN 2012			
17	Nomor 2 Tahun 2013 (25 Februari 2013)	PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA PADA PT BALAIRUNG CITRAJAYA SUMBAR	
18	Nomor 3 Tahun 2013 (25 Februari 2013)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT	Mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 dan diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2017
19	Nomor 6 Tahun 2013 (25 Februari 2013)	PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH DHARMASRAYA MANDIRI	
TAHUN 2014			
20	Nomor 2 Tahun 2014 (10 Maret 2014)	TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN	-
TAHUN 2015			
21	Nomor 6 Tahun 2015 (31 Desember 2015)	KAWASAN TANPA ROKOK	-
22	Nomor 7 Tahun 2015 (31 Desember 2015)	PENYELENGGARAAN REKLAME	-
23	Nomor 8 Tahun 2015 (31 Desember 2015)	PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	-
24	Nomor 9 Tahun 2015 (31 Desember 2015)	PENGELOLAAN SAMPAH	-
2016			
25	Nomor 1 Tahun 2016 (4 Mei 2016)	PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI	-
26	Nomor 2 Tahun 2016 (4 Mei 2016)	PEDOMAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAERAH	-

27	Nomor 7 Tahun 2016 (28 Desember 2016)	PENYELENGGRAAN KEARSIPAN	-
TAHUN 2017			
28	Nomor 1 Tahun 2017 (2 Mei 2017)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENATAAN NAGARI	Mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009
29	Nomor 2 Tahun 2017 (5 Juni 2017)	PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	-
30	Nomor 3 Tahun 2017 (5 Juni 2017)	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 19 TAHUN 2007 TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI, PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2008 TENTANG URUSAN PEMERINTAHAN YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA, PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH SERTA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK KARTU TANDA PENDUDUK DAN CATATAN SIPIL	Mencabut Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2007 Mencabut Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 Mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012
31	Nomor 5 Tahun 2017 (8 Agustus 2017)	HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Sebagian Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006
32	Nomor 8 Tahun 2017 (22 Desember 2017)	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA BARAT (BANK NAGARI) DAN PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT	Mengubah Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Nomor 3 Tahun 2013
33	Nomor 9 Tahun 2017 (22 Desember 2017)	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	Mencabut Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009
TAHUN 2018			
34	Nomor 1 Tahun 2018 (16 Januari 2018)	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-
35	Nomor 2 Tahun 2018 (16 Januari 2018)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Mengubah Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010

36	Nomor 3 Tahun 2018 (19 April 2018)	PENGELOLAAN ZAKAT	-
37	Nomor 4 Tahun 2018 (19 April 2018)	PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM	-
38	Nomor 5 Tahun 2018 (13 Agustus 2018)	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	-
39	Nomor 6 Tahun 2018 (13 Agustus 2018)	PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	-
40	Nomor 7 Tahun 2018 (13 Agustus 2018)	PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	-
41	Nomor 13 Tahun 2018 (31 Desember 2018)	KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH	-
42	Nomor 14 Tahun 2018 (31 Desember 2018)	PENANAMAN MODAL	-
43	Nomor 15 Tahun 2018 (31 Desember 2018)	PENGENDALIAAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT RABIES	-
44	Nomor 16 Tahun 2018 (31 Desember 2018)	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	-
45	Nomor 17 Tahun 2018 (31 Desember 2018)	PENYELENGGARAAN MENARA TELEKOMUNIKASI	-
46	Nomor 18 Tahun 2018 (31 Desember 2018)	PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN	-

TAHUN 2019

47	Nomor 4 Tahun 2019 (3 Desember 2019)	KERJA SAMA DAERAH	-
48	Nomor 5 Tahun 2019 (3 Desember 2019)	PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 7 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN	Mencabut Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012
49	Nomor 6 Tahun 2019 (26 Desember 2019)	RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2019-2039	-

TAHUN 2021

50	Nomor 5 Tahun 2021 (27 Desember 2021)	PENATAAN TEMPAT PEMAKAMAN DAN PENYELENGGARAAN PEMAKAMAN	-
----	---	---	---

TAHUN 2022

51	Nomor 1 Tahun 2022 (17 Juni 2022)	PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Mencabut Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010
52	Nomor 2 Tahun 2022 (17 Juni 2022)	PENANGGULANGAN BENCANA	-
53	Nomor 3 Tahun 2022 (17 Juni 2022)	PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN	-
54	Nomor 6 Tahun 2022 (27 Desember 2022)	FASILITASI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA	-

55	Nomor 8 Tahun 2022 (30 Desember 2022)	PENGELOLAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK	-
TAHUN 2023			
56	Nomor 1 Tahun 2023 (12 April 2023)	RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2023-2043	Mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012
57	Nomor 2 Tahun 2023 (12 April 2023)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH	Mengubah Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016
58	Nomor 4 Tahun 2023 (27 Juli 2023)	PELESTARIAN ADAT DAN PEMAJUAN KEBUDAYAAN	-
59	Nomor 5 Tahun 2023 (27 Juli 2023)	TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH	-
60	Nomor 5 Tahun 2023 (27 Juli 2023)	TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH DAERAH	-
61	Nomor 7 Tahun 2023 (27 Juli 2023)	BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021
62	Nomor 8 Tahun 2023 (27 Juli 2023)	PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN	-
63	Nomor 9 Tahun 2023 (27 Juli 2023)	PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA MIKRO DAN EKONOMI KREATIF	-
64	Nomor 11 Tahun 2023 (21 November 2023)	RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN TAHUN 2023-2043	-
2024			
65	Nomor 1 Tahun 2024 (1 Januari 2024)	PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	- Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025
66	Nomor 4 Tahun 2024 (1 Januari 2024)	PENYELENGGARAAN KETENAGAKERJAAN	-
67	Nomor 5 Tahun 2024 (1 Januari 2024)	PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN KETAHANAN KELUARGA	-
68	Nomor 6 Tahun 2024 (1 Januari 2024)	RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045	-

TAHUN 2025			
NO	NOMOR / TAHUN & TGL	TENTANG	KETERANGAN
TAHUN 2005			
75	NOMOR 2 TAHUN 2005 (16 MEI 2005)	PELAKSANAAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR	
76	NOMOR 6 TAHUN 2005 (29 JULI 2005)	PENGELOLAAN JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH KB DI DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
77	NOMOR 8 TAHUN 2005 (26 OKTBER 2005)	KOORDINASI PELAKSANAAN PROGRAM EKSTENSIFIKASI WAJIB PAJAK DAN INTENSIFIKASI PAJAK PENGHASIL ORANG PRIBADI DALAM NEGERI DAN PAJAK PENGHASIL PASAL 21 KABUPATEN DHARMASRAYA	
TAHUN 2006			
78	NOMOR 16 TAHUN 2006 (20 Desember 2006)	PEMBIDANGAN TUGAS DAN KEWENANGAN WAKIL BUPATI	
TAHUN 2007			
79	NOMOR 2 TAHUN 2007 (31 JANUARI 2007)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS INSTALASI FORMASI DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
80	NOMOR 9 TAHUN 2007 (22 MEI 2007)	PENYISIHAN DANA KAS DAERAH DALAM BENTUK DEPOSITO BERJANGKA PADA BANK NAGARI BPD SUMATERA BARAT CABANG PEMBANTU PULAU PUNJUNG	

81	NOMOR 10 TAHUN 2007 (30 MEI 2007)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PENGELOLA KELUARGA BERENCANA DINAS SOSIAL, PEMERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN DHARMASRAYA	
82	NOMOR 13 TAHUN 2007 (31 MEI 2007)	IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI	
83	NOMOR 15 TAHUN 2007 (27 JUNI 2007)	MAJELIS PERTIMBANGAN PEGAWAI	
84	NOMOR 27 TAHUN 2007 (28 SEPTEMBER 2007)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PERBENIHAN PERKEBUNAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
TAHUN 2008			
85	NOMOR 1.A TAHUN 2008 (14 JANUARI 2008)	PENYELENGARAAN OPERASIONAL PERPUSTAKAAN KELILING	
86	NOMOR 10 TAHUN 2008 (28 MARET 2008)	PELAKSANAAN 5 (LIMA) HARI KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
87	NOMOR 23 TAHUN 2008 (12 AGUSTUS 2008)	BATAS USIA PENSIUN BAGI PEJABAT STRUCTURAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
88	NOMOR 33 TAHUN 2008 (22 DESEMBER 2008)	WAJIB LAPOR LOWONGAN PEKERJAAN DI PERUSAHAAN	
TAHUN 2009			
89	NOMOR 60 TAHUN 2009 (16 NOVEMBER 2009)	PELAKSANAAN FAKTA INTEGRITAS DALAM PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
90	NOMOR 62 TAHUN 2009 (20 NOVEMBER 2009)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KESEHATAN INSTALASI GUDANG FORMASI	
TAHUN 2010			
91	NOMOR 4 TAHUN 2010 (18 JANUARI 2010)	PENERIMA ANGSURAN KPR-BTN MELALUI PEMOTONGAN GAJI PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
92	NOMOR 7 TAHUN 2010 (15 FEBRUARI 2010)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI BALAI LATIHAN KERJA (BLK)	
93	NOMOR 10 TAHUN 2010 (24 MARET 2010)	PERESMIAN OPERASIONAL PASAR TERNAK AGROPOLITAN GUNUNG MEDAN	
94	NOMOR 18 TAHUN 2010 (17 MEI 2010)	PEMBENTUKAN UPTD KESEHATAN LABORATORIUM KESEHATAN (LABKESDA)	
95	NOMOR 25 TAHUN 2010 (27 MEI 2010)	SISTIM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	

96	NOMOR 30 TAHUN 2010 (26 AGUS 2010)	PENGELOLAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	
97	NOMOR 51 TAHUN 2010 (31 DESEMBER 2010)	PENETAPAN KELAS JALAN PADA RUAS JALAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
98	NOMOR 52 TAHUN 2010 (31 DESEMBER 2010)	BADAN NARKOTIKA KABUPATEN DHARMASRAYA	
TAHUN 2011			
99	NOMOR 1 TAHUN 2011 (10 JANUARI 2011)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DILINGKUNGAN DINAS KASEHATAN	
100	NOMOR 2 TAHUN 2011 (10 JANUARI 2011)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKANAAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DILINGKUNGAN DINAS KASEHATAN	
101	NOMOR 3 TAHUN 2011 (10 JANUARI 2011)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS INTALASI GUDANG FORMASI DILINGKUNGAN DINAS KASEHATAN	
102	NOMOR 7 TAHUN 2011 (11 JANUARI 2011)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS SEKOLAH MENENGAH ATAS DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
103	NOMOR 8 TAHUN 2011 (11 JANUARI 2011)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKANAAN TEKNIS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA	
104	NOMOR 12 TAHUN 2011 (31 JANUARI 2011)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 21 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN UMUM PELAYANAN DAN PEMBERIAAN BANTUAN SOCIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
105	NOMOR 18 TAHUN 2011 (1 MARET 2011)	KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA, KABUPATEN DIJUNJUNG, KABUPATEN SOLOK SELATAN DAN KABUPATEN PESISIR SELATAN TENTANG KERJASAMA PEMBANGUNAN ANTAR DAERAH	
106	NOMOR 27 TAHUN 2011 (6 APRIL 2011)	TATA CARA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU YANG BERASAL BARU HUTAN HAK DAN LAHAN MASYARAKAT	
107	NOMOR 29 TAHUN 2011 (8 APRIL 2011)	PEDOMAN PENGELOLA PENGEMBANGAN WIRA USAHA KOLOM IKAN	
108	NOMOR 30 TAHUN 2011 (8 APRIL 2011)	INVESTASI JANGKA PENDEK (DEPOSITO) PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
109	NOMOR 32 TAHUN 2011 (8 APRIL 2011)	PETUNJUK PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PENGUSAHAAN SARANG BURUNG WALLET	

110	NOMOR 34 TAHUN 2011 (25 MEI 2011)	PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
111	NOMOR 35 TAHUN 2011 (29 JUNI 2011)	MEKANISME PENETAPAN WILAYAH PERTAMBANGAN RAKYAT DAN PROSEDUR IZIN PERTAMBANGAN RAKYAT	
112	NOMOR 40 TAHUN 2011 (14 JULI 2011)	PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN HIBAH DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG INFRASTRUKTUR SUB. BIBANG SANITASI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
113	NOMOR 41 TAHUN 2011 (41 JULI 2011)	PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DHARMASRAYA	
114	NOMOR 45 TAHUN 2011 (8 AGUSTUS 2011)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 30 TAHUN 2010 TENTANG PENGELOLAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) DI PUSKESMAS DAN JARINGANNYA	
115	NOMOR 46 TAHUN 2011 (8 AGUSTUS 2011)	PENGELOLAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PESALINAN JAM PERSAL DI PUSKESMAS DAN JARINGAN	
116	NOMOR 51 TAHUN 2011 (30 SEPTEMBER 2011)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 34 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN SOSIAL DILINGKUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
117	NOMOR 52 TAHUN 2011 (30 SEPTEMBER 2011)	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN MESIN PROSES PRODUKSI UNTUK INDUSTRI MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DHAMASRAYA	
118	NOMOR 60 TAHUN 2011 (15 NOVEMBER 2011)	TATA NIAGA TERNAK	
119	NOMOR 90 TAHUN 2011 (29 DESEMBER 2011)	URAIAN TUGAS JABATAN KECAMATAN	
120	NOMOR 93 TAHUN 2011 (30 DESEMBER 2011)	KEMITRAAN USAHA PETERNAKAN BAGI PEMUDA PELOPOR	
121	NOMOR 94 TAHUN 2011 (30 DESEMBER 2011)	PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
TAHUN 2012			
122	NOMOR 3 TAHUN 2012 (2 JANUARI 2012)	RENCANA AKSI DAERAH PENYEDIAAN AIR MINUM DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN (RAD 257AMPL)	
123	NOMOR 11 TAHUN 2012 15 FEBRUARI 2012	PENYELENGGARAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN KABUPATEN DHARMASRAYA	

124	NOMOR 21 TAHUN 2012 8 MEI 2012	PENETAPAN RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DAN ALAT PEMBERI ISYARAT LALU LINTAS	
125	NOMOR 23 TAHUN 2012 16 MEI 2012	PELIMPAHAN SEBAGIAN WEWENANG BUPATI KEPADA CAMAT	
126	NOMOR 26 TAHUN 2012 8 JUNI 2012	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM TANAH, DAUN, PUPUK DAN KULTURBJARINGAN DILINGKUNGAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	
127	NOMOR 34 TAHUN 2012 18 JULI 2012	PETUNJUK TEKNIS PEMERIAN BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SISWA/MAHA SISWA TIDAK MAMPU DAN BERPRESTASI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
128	NOMOR 37 TAHUN 2012 23 AGUSTUS 2012	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 96 TAHUN 2011 TENTANG TATACARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL	
129	NOMOR 38 TAHUN 2012 24 AGUSTUS 2012	PENGELOLAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN PERSALINAN (JAMPERSAL) DI PUSKESMAS DAN JARINGANYA	
130	NOMOR 46 TAHUN 2012 4 OKTOBER 2012	MUTASI DAN ALIH TUGAS JABATAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KAB.DHARMASRAYA	
131	NOMOR 59 TAHUN 2012 26 NOVEMBER 2012	PEDOMAN TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
132	NOMOR 65 TAHUN 2012 26 DESEMBER 2012	PEDOMAN PENGELOLAAN SAPI POTONG MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
TAHUN 2013			
133	NOMOR 2 TAHUN 2013 16 JANUARI 2013	PEDOMAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JALUR PENDIDIKAN FORMAL (SEKOLAH) DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
134	NOMOR 4 TAHUN 2013 16 JANUARI 2013	PETUNJUK TEKNIS PEMEKARAN JORONG DALAM NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
135	NOMOR 5 TAHUN 2013 1 FEBRUARI 2013	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
136	NOMOR 6 TAHUN 2013 11 FEBRUARI 2013	PEDOMAN UMUM PELAKSANAAN PENGARUSUTAN GENDER DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
137	NOMOR 7 TAHUN 2013 18 FEBRUARI 2013	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PERALATAN DAN PERBEKALAN DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM	

138	NOMOR12 TAHUN 2013 17 APRIL 2013	PEMBENTUKAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI LINGKUNAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
139	NOMOR13 TAHUN 2013 17 APRIL 2013	PEDOMAN KERJA PENYULUH PETANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
140	NOMOR12 TAHUN 2013 17 APRIL 2013	PEMBENTUKAN UPT BALAI PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN DI LINGKUNAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
141	NOMOR 19 TAHUN 2013 24 JUNI 2013	JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN DHARMASRAYA	
142	NOMOR 24 TAHUN 2013 26 JULI 2013	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANAAN TEKNIS BALAI BENIH IKAN (BBI) PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
143	NOMOR 25 TAHUN 2013 26 JULI 2013	PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
144	NOMOR 29 TAHUN 2013 1 AGUSTUS 2013	KESATUAN PELAKSANAAN HUTAN PRODUksi KABUPATEN DHARMASRAYA	
145	NOMOR 30 TAHUN 2013 14 AGUSTUS 2013	PETUNJUK TEKNIS SENSUS BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
146	NOMOR 31 TAHUN 2013 14 AGUSTUS 2013	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM DI LINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA	
147	NOMOR 32 TAHUN 2013 14 AGUSTUS 2013	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN HEWAN (PUSKESWAN) DILINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
148	NOMOR 33 TAHUN 2013 14 AGUSTUS 2013	STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PELAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
149	NOMOR 34 TAHUN 2013 26 SEPTEMBER 2013	PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
150	NOMOR 35 TAHUN 2013 26 SEPTEMBER 2013	SISTIM RUJUKAN PELAYANAN KESEHATAN	
151	NOMOR 36 TAHUN 2013 26 SEPTEMBER 2013	OPTIMALISASI PERAN FASILITAS PEMBERI PELAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA, PENERAPAN SISTIM RUJUKAN BERJENJANG DAN PENGENDALIAN RUJUKAN	

152	NOMOR 49 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
153	NOMOR 50 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	
154	NOMOR 51 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS SOSIAL TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	
155	NOMOR 52 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	
156	NOMOR 53 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	
157	NOMOR 54 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS KESEHATAN	
158	NOMOR 55 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI, PARIWISATA DAN BUDAYA	
159	NOMOR 56 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS PEKERJAAN UMUM	
160	NOMOR 57 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH	
161	NOMOR 58 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA	
162	NOMOR 59 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
163	NOMOR 60 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN	
164	NOMOR 61 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	
165	NOMOR 62 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
166	NOMOR 63 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN INSPEKTORAT	
167	NOMOR 64 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
168	NOMOR 65 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN BADAN LINGKUNGAN HIDUP	
169	NOMOR 66 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN BADAN PEMERDAYAAN MASYARAKAT, LEMBAGA-LEMBAGA NAGARI, PEMERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	
170	NOMOR 67 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PELAKSANA PENYULUHAN	
171	NOMOR 68 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA	
172	NOMOR 69 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	
173	NOMOR 70 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	
174	NOMOR 71 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN KANTOR SATUAN BANGSA DAN POLITIK	

175	NOMOR 72 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	
176	NOMOR 73 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	
177	NOMOR 74 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	
178	NOMOR 75 TAHUN 2013 30 DESEMBER 2013	INFORMASI JABATAN KECAMATAN	
TAHUN 2014			
179	NOMOR 2 TAHUN 2014 17 JANUARI 2014	PEDOMAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH DAN IZIN PENCANTUMAN GELAR AKADEMIK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGKAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018
180	NOMOR 6 TAHUN 2014 20 FEBRUARI 2014	STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA	
181	NOMOR 7 TAHUN 2014 19 FEBRUARI 2014	PEDOMAN PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
182	NOMOR 9 TAHUN 2014 19 MARET 2014	PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGKAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
183	NOMOR 10 TAHUN 2014 19 MARET 2014	POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
184	NOMOR15 TAHUN 2014 APRI 2014	PEDOMAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	
185	NOMOR16 TAHUN 2014 5 MEI 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 7 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN DANA JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (JKN) DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
186	NOMOR18 TAHUN 2014 5 MEI 2014	TATA CARA PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP BENDAHARA DAN BUKAN BENDAHARA DI LINGKUNGKAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
187	NOMOR19 TAHUN 2014 5 MEI 2014	PEDOMAN PENDIRIAN SEKOLAH DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
188	NOMOR 21 TAHUN 2014 2 JUNI 2014	STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG SOSIAL DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
189	NOMOR 24 TAHUN 2014 18 JUNI 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BATUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	

190	NOMOR 24 TAHUN 2014 18 JUNI 2014	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PEDOMAN DAN PROSEDUR PEMBERIAN HIBAH DAN BATUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
191	NOMOR 30 TAHUN 2014 23 JULI 2014	PENYUSUNAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET TETAP	
192	NOMOR 31 TAHUN 2014 23 JULI 2014	PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN KEPADA KEPALA BADAN PERIZINAN, PENANAMAN MODAL DAN PENGADAAN BARANG/JASA KABUPATEN DHARMASRAYA	
193	NOMOR 32 TAHUN 2014 23 JULI 2014	PENETAPAN HARGA ENCERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNGAN 3 KG DITINGKAT PANGKALAN DALAM KABUPATEN DHARMASRAYA	
194	NOMOR 34 TAHUN 2014 1 SEPTEMBER 2014	TARIF PELAYANAN AIR BERSIH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS SISTEM PELANAN AIR MINUM (UPT SPAM) KABUPATEN DHARMASRAYA	
195	NOMOR 36 TAHUN 2014 2 SEPTEMBER 2014	PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PERDESAAN SEHAT	
196	NOMOR 37 TAHUN 2014 11 SEPTEMBER 2014	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
197	NOMOR 40 TAHUN 2014 17 SEPTEMBER 2014	STANDAR PELAYANAN MINIMAL PUSKESMAS	
198	NOMOR 41 TAHUN 2014 17 SEPTEMBER 2014	POLA TATA KELOLA PUSKESMAS	
199	NOMOR 47 TAHUN 2014 31 DESEMBER 2014	PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH DI KABUPATEN DHARMASRAYA	

TAHUN 2015

200	NOMOR 1 TAHUN 2015 2 JANUARI 2015	MEKANISME PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA	
201	NOMOR 3 TAHUN 2015 2 JANUARI 2015	SISTEM AKUNTASI KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA	
202	NOMOR 4 TAHUN 2015 2 JANUARI 2015	JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	
203	NOMOR 12 TAHUN 2015 30 JANUARI 2015	HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) TABUNG 3 KG DI TINGKAT PANGKALAN DALAM KABUPATEN DHARMASRAYA	

204	NOMOR 13 TAHUN 2015 30 JANUARI 2015	TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
205	NOMOR 14 TAHUN 2015 30 JANUARI 2015	PEMBERIAN AIR SUSU IBU EKSKLUSIF	
206	NOMOR 17 TAHUN 2015 24 MARET 2015	PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGAI (APB-NAGARI)	
207	NOMOR 18 TAHUN 2015 24 MARET 2015	URAIAN TUGAS PELAKSANAAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
208	NOMOR 19 TAHUN 2015 27 MARET 2015	TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANAJA DAERAH	
209	NOMOR 22 TAHUN 2015 10 APRIL 2015	PENYELENGGARAAN DAN PEMBERHENTIAN PEGAWAI YANG BERASAL DARI NON PNS PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	
210	NOMOR 23 TAHUN 2015 20 MEI 2015	PEDOMAN TEKNIS PENILAIAN NAGARI TERBAIK BIDANG KEAMANAN DAN KETERTIBAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
211	NOMOR 27 TAHUN 2015 1 JUNI 2014	PEDOMAN PENGELOLAAN DANA KOMITE SEKOLAH	
212	NOMOR 28 TAHUN 2015 1 JUNI 2014	PETUNTUK TEKNIS DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PERTEMUAN / RAPAT DI LUAR KANTOR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
213	NOMOR 31 TAHUN 2015 13 JULI 2014	PEMANFAATAN DANA JASA LAYANAN PASA UNIT PELASKANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN DHARMASRAYA	
214	NOMOR 33 TAHUN 2015 27 JULI 2014	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN PEKAN TERNAK DI LINGKUNGAN DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	
215	NOMOR 34 TAHUN 2015 11 AGUSTUS 2015	PEDOMAN PENGELOLAAN SMS PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
216	NOMOR 36 TAHUN 2015 11 AGUSTUS 2015	JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPAKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	
217	NOMOR 40 TAHUN 2015 14 AGUSTUS 2015	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP	
218	NOMOR 44 TAHUN 2015 24 AGUSTUS 2015	PEDOMAN PENYELENGGRAAN PEMBAURAN KEBANGSAAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
219	NOMOR 45 TAHUN 2015 2 SEPTEMBER 2015	TATACARA PENYUSUNAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	

220	NOMOR 46 TAHUN 2015 2 SEPTEMBER 2015	SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
221	NOMOR 62 TAHUN 2015 31 DESEMBER 2015	PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018
TAHUN 2016			
222	NOMOR 4 TAHUN 2016 (16 FEBRUARI 2016)	STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
223	NOMOR 5 TAHUN 2016 (29 FEBRUARI 2016)	PENCABUTAN PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 8 TAHUN 2014 TENTANG SANKSI ADMINISTRASI ATAS KETERLAMBATAN PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2014
224	NOMOR 7 TAHUN 2016 (29 FEBRUARI 2016)	PEDOMAN UMUM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI	
225	NOMOR 11 TAHUN 2016 (1 MARET 2016)	PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM MANUAL RUJUKAN MATERNAL NEONATAL	
226	NOMOR 15 TAHUN 2016 (26 MEI 2016)	STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH NAGARI	
227	NOMOR 16 TAHUN 2016 (26 MEI 2016)	TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
228	NOMOR 19 TAHUN 2016 (29 JUNI 2016)	INSTRUKMEN MONITORING DAN EVALUASI PEMBANGUNAN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
229	NOMOR 33 TAHUN 2016 34(10 OKTOBER 2016)	PENATAKELOLAAN KEPEMUDAAN DI DHARMASRAYA	ORGANISASI KABUPATEN
230	NOMOR 34 TAHUN 2016 (1 NOVEMBER 2016)	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2016	
231	NOMOR 36 TAHUN 2016 (23 NOVEMBER 2016)	PEDOMAN PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
232	NOMOR 38 TAHUN 2016 (28 NOVEMBER 2016)	TATA KELOLA PENYUSUNAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP SERTA SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN DHARMASRAYA	

233	NOMOR 41 TAHUN 2016 (28 NOVEMBER 2016)	PERJALANAN DINAS BAGI BUPATI/WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
234	NOMOR 66 TAHUN 2016 (28 NOVEMBER 2016)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA KECAMATAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
TAHUN 2017			
235	NOMOR 8 TAHUN 2017 (3 FEBRUARI 2017)	RENCANA INDUK PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2010-2036	
236	NOMOR 9 TAHUN 2017 (3 FEBRUARI 2017)	PEDOMAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
237	NOMOR 12 TAHUN 2017 (3 FEBRUARI 2017)	PENDELEGASIAN WEWENANG BUPATI DHARMASRAYA KEPADA CAMAT UNTUK MENGEVALUASI RANCANGAN PERATURAN NAGARI TENTANG PERENCANAAN KEUANGAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APB NAGARI	
238	NOMOR 13 TAHUN 2017 (16 MARET 2017)	PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI SISTEN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
239	NOMOR 17 TAHUN 2017 (10 APRIL 2017)	PEDOMAN UMUM PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH DHARMASRAYA	
240	NOMOR 18 TAHUN 2017 (10 APRIL 2017)	PAKAIAN DINAS PEGAWAI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
241	NOMOR 20 TAHUN 2017 (28 APRIL 2017)	PENDELEGASIAN DAN PELIMPAHAN WEWENANG PERIZINAN KEPADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA	
242	NOMOR 23 TAHUN 2017 (29 MEI 2017))	MEKANISME PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
243	NOMOR 24 TAHUN 2017 (29 MEI 2017)	MEKANISME PENGELOLAAN ANGGARAN KAS PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
244	NOMOR 25 TAHUN 2017 (29 MEI 2017)	TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI NAGARI	

245	NOMOR 26 TAHUN 2017 (29 MEI 2017)	KODE ETIK DAN PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
246	NOMOR 28 TAHUN 2017 (29 MEI 2017)	PEDOMAN MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
247	NOMOR 29 TAHUN 2017 (5 JUNI 2017)	PEDOMAN PENGELOLAAN BANTUAN LANGSUNG MASYARAKAT PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA	
248	NOMOR 31 TAHUN 2017 (26 JUNI 2017)	PETUNJUK TEKNIS PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENEGAH DAN RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
249	NOMOR 33 TAHUN 2017 (6 JULI 2017)	LAPORAN WALI NAGARI	
250	NOMOR 34 TAHUN 2017 (6 JULI 2017)	MUTASI DAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
251	NOMOR 35 TAHUN 2017 (6 JULI 2017)	PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM SUBSIDI BERAS SEJAHTERA DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017	
252	NOMOR 36 TAHUN 2017 (20 JULI 2017)	PEMBENTUK UNIT LAYANAN BARANG/JASA KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2013
253	NOMOR 39 TAHUN 2017 (14 AGUSTUS 2017)	PEMBENTUKAN LAYANAN PENGADAAN SECRA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
254	NOMOR 43 TAHUN 2017 (13 OKTOBER 2017)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2014
255	NOMOR 44 TAHUN 2017 (13 OKTOBER 2017)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017
256	NOMOR 45 TAHUN 2017 (13 OKTOBER 2017)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
257	NOMOR 46 TAHUN 2017 (23 OKTOBER 2017)	PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017	
258	NOMOR 47 TAHUN 2017 (24 OKTOBER 2017)	PEMBEBANAN BIAYA PERSIAPAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN DHARMASRAYA	

259	NOMOR 48 TAHUN 2017 (24 OKTOBER 2017)	PENYALURAN BIBIT UNGGUL PERKEBUNAN PRODUKSI DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2009
260	NOMOR 50 TAHUN 2017 (31 OKTOBER 2017)	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Diubah beberapa kali dengan: - Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 - Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 - Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025
261	NOMOR 51 TAHUN 2017 (31 OKTOBER 2017)	PETA JABATAN DAN NAMA JABATAN PELAKSANA SERTA NAMA JABATAN FUNGSIONAL TERTENTU BAGI PNS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
262	NOMOR 52 TAHUN 2017 (31 OKTOBER 2017)	PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
263	NOMOR 53 TAHUN 2017 (1 NOVEMBER 2017)	PEDOMAN PENILAIAN RESIKO KABUPATEN DHARMASRAYA	
264	NOMOR 54 TAHUN 2017 (1 NOVEMBER 2017)	PENGADAAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
265	NOMOR 112 TAHUN 2017 (30 NOVEMBER 2017)	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
266	NOMOR 113 TAHUN 2017 (30 NOVEMBER 2017)	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
267	NOMOR 114 TAHUN 2017 (30 NOVEMBER 2017)	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN DHARMASRAYA	
268	NOMOR 115 TAHUN 2017 (30 NOVEMBER 2017)	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN DHARMASRAYA	
269	NOMOR 116 TAHUN 2017 (30 NOVEMBER 2017)	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
270	NOMOR 118 TAHUN 2017 (30 NOVEMBER 2017)	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
271	NOMOR 119 TAHUN 2017 (30 NOVEMBER 2017)	PEDOMAN PELAKSANA E-LHKPN KABUPATEN DHARMASRAYA	

272	NOMOR 120 TAHUN 2017 (5 DESEMBER 2017)	JENJANG NILAI PENGADUAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH	
273	NOMOR 121 TAHUN 2017 (5 DESEMBER 2017)	RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2019
274	NOMOR 123 TAHUN 2017 (27 DESEMBER 2017)	PETUNUJUK TEKNIS PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO KECIL	
275	NOMOR 124 TAHUN 2017 (27 DESEMBER 2017)	PENDELEGASIAN KEWENANGAN PEMBERIAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL KEPADA CAMAT	
276	NOMOR 125 TAHUN 2017 (27 DESEMBER 2017)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG KESEHATAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
277	NOMOR 126 TAHUN 2017 (27 DESEMBER 2017)	POLA TATA KELOLA PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2019
278	NOMOR 127 TAHUN 2017 (27 DESEMBER 2017)	PENYELENGGARAAN KONSULTASI PUBLIK	
279	NOMOR 128 TAHUN 2017 (27 DESEMBER 2017)	PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK	
280	NOMOR 129 TAHUN 2017 (27 DESEMBER 2017)	KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
281	NOMOR 130 TAHUN 2017 (27 DESEMBER 2017)	KEMANDIRIAN PANGAN DAERAH	

TAHUN 2018

282	NOMOR 3 TAHUN 2018 (16 JANUARI 2018)	PEMBENTUKAN BALAI PENYULUHAN PERTANIAN DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
283	NOMOR 8 TAHUN 2018 (16 JANUARI 2018)	PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN JASA LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
284	NOMOR 13 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	KERJASAMA DAERAH	
285	NOMOR 14 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	PENGELOLAAN IRIGASI	
286	NOMOR 15 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	BATAS NAGARI KOTO LAWEH KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA	
287	NOMOR 16 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	BATAS NAGARI KOTO TINGGI KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA	

288	NOMOR 17 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	BATAS NAGARI KOTO GADANG KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA	
289	NOMOR 18 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	BATAS NAGARI ABAI SIAT KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA	
290	NOMOR 19 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	BATAS NAGARI SUNGAI DUO KECAMATAN SITIUNG KABUPATEN DHARMASRAYA	
291	NOMOR 20 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	BATAS NAGARI KOTO BESAR KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA	
292	NOMOR 21 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	BATAS NAGARI KOTO RANAH KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA	
293	NOMOR 22 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	BATAS NAGARI BONJOL KECAMATAN KOTO BESAR KABUPATEN DHARMASRAYA	
294	NOMOR 23 TAHUN 2018 (23 APRIL 2018)	PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA PENYANDANG MASALAH KESEJAHTERAAN SOSIAL DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
295	NOMOR 24 TAHUN 2018 (18 MEI 2018)	PENGELOLAAN RUMAH SUSUN SEDERHANA SEWA MILIK PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
296	NOMOR 37 TAHUN 2018 (3 SEPTEMBER 2018)	PENGGUNAAN SURPLUS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH	
297	NOMOR 38 TAHUN 2018 (3 SEPTEMBER 2018)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 62 TAHUN 2015 TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PENYELESAIAN PEKERJAAN YANG TIDAK TERSELESAIKAN SAMPAI AKHIR TAHUN ANGGARAN	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2015
298	NOMOR 39 TAHUN 2018 (3 SEPTEMBER 2018)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 24 TAHUN 2016 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WALI NAGARI	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016
299	NOMOR 40 TAHUN 2018 (22 OKTOBER 2018)	KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA DAN SAMPAH SEJENIS SAMPAH RUMAH TANGGA	
300	NOMOR 42 TAHUN 2018 (30 OKTOBER 2018)	BADAN USAHA MILIK NAGARI	
301	NOMOR 43 TAHUN 2018 (1 NOVEMBER 2018)	TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
302	NOMOR 45 TAHUN 2018 (1 NOVEMBER 2018)	PEDOMAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARAAN NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2015

303	NOMOR 46 TAHUN 2018 (1 NOVEMBER 2018)	NILAI JUAL HASIL PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2022
304	NOMOR 76 TAHUN 2018 (1 NOVEMBER 2018)	TATA CARA TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL BUKAN BENDAHARA DAN PEJABAT LAIN	
305	NOMOR 77 TAHUN 2018 (1 NOVEMBER 2018)	TATA KERJA PELAKSANAAN HUKUM ACARA MEJELIS PERTIMBANGAN TUNTUTAN GANTI RUGI	
306	NOMOR 79 TAHUN 2018 (1 NOVEMBER 2018)	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG PENYELNGGARAAN BANTUAN HUKUM	
307	NOMOR 81 TAHUN 2018 (5 NOVEMBER 2018)	PENYELENGGARAAN PERSEDIAAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
308	NOMOR 115 TAHUN 2018 (28 DESEMBER 2018)	PEDOAMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DIKABUPATEN DHARMASRAYA	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2020
309	NOMOR 119 TAHUN 2018 (28 DESEMBER 2018)	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 3 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT	

TAHUN 2019

310	NOMOR 2 TAHUN 2019 (7 JANUARI 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA	
311	NOMOR 3 TAHUN 2019 (10 JANUARI 2019)	PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI	
312	NOMOR 6 TAHUN 2019 (10 JANUARI 2019)	PENGEMBANGAN KABUPATEN LAYAK ANAK	
313	NOMOR 7 TAHUN 2019 (10 JANUARI 2019)	PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN TERNAK MILIK DAERAH	
314	NOMOR 14 TAHUN 2019 (3 MEI 2019)	TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2021
315	NOMOR 15 TAHUN 2019 (3 MEI 2019)	PELAPORAN REALISASI FISIK DAN KEUANGAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	

316	NOMOR 16 TAHUN 2019 (3 MEI 2019)	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI KERPROTOKOLER BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
317	NOMOR 18 TAHUN 2019 (3 MEI 2019)	TATA CARA PENYUSUNAN DAN PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK	
318	NOMOR 20 TAHUN 2019 (3 MEI 2019)	PEDOMAN PELAKSANAAN SISTEM PENANGANAN PENGADUAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
319	NOMOR 21 TAHUN 2019 (16 MEI 2019)	TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK PADA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
320	NOMOR 22 TAHUN 2019 (16 MEI 2019)	PEDOMAN PENYUSUNAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT	
321	NOMOR 24 TAHUN 2019 (11 JUNI 2019)	PENGELOLAAN RUMAH KHUSUS DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
322	NOMOR 25 TAHUN 2019 (28 JUNI 2019)	TATA CARA PEMELIHARAAN ARSIP VITAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
323	NOMOR 26 TAHUN 2019 (28 JUNI 2019)	SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
324	NOMOR 27 TAHUN 2019 (28 JUNI 2019)	JADWAL RETENSI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2021
325	NOMOR 28 TAHUN 2019 (28 JUNI 2019)	PROSEDUR PENYUSUTAN ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2007
326	NOMOR 30 TAHUN 2019 (28 JUNI 2019)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBIAI	
327	NOMOR 31 TAHUN 2019 (28 JUNI 2019)	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA	
328	NOMOR 34 TAHUN 2019 (1 JULI 2019)	DAFTAR KEWENANGAN NAGARI BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2017

329	NOMOR 39 TAHUN 2019 (27 AGUSTUS 2019)	TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBEBANAN BIAYA PENEGAKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
330	NOMOR 41 TAHUN 2019 (16 SEPTEMBER 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NO 44 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016
331	NOMOR 42 TAHUN 2019 (16 SEPTEMBER 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NO 46 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016
332	NOMOR 43 TAHUN 2019 (16 SEPTEMBER 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NO 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 52 Tahun 2016
333	NOMOR 44 TAHUN 2019 (16 SEPTEMBER 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NO 53 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI. URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016
334	NOMOR 45 TAHUN 2019 (16 SEPTEMBER 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NO 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTAHANAN KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016

335	NOMOR 46 TAHUN 2019 (16 SEPTEMBER 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NO 65 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016
336	NOMOR 47 TAHUN 2019 (16 SEPTEMBER 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NO 54 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2016
337	NOMOR 53 TAHUN 2019 (18 SEPTEMBER 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NO 58 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, URAIAN TUGAS JABATAN SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016
338	NOMOR 57 TAHUN 2019 (18 SEPTEMBER 2019)	TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	
339	NOMOR 61 TAHUN 2019 (25 SEPTEMBER 2019)	BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN LEGISLATIF TAHUN 2019	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2019 sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2019 Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022
340	NOMOR 62 TAHUN 2019 (7 OKTOBER 2019)	STANDAR PERJALANAN DINAS BUPATI ATAU WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2019	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020
341	NOMOR 63 TAHUN 2019 (8 OKTOBER 2019)	TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES SERTA PEMANFAATAN NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
342	NOMOR 65 TAHUN 2019 (8 OKTOBER 2019)	PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN SECARA ONLINE DI KABUPATEN DHARMASRAYA	

343	NOMOR 66 TAHUN 2019 (8 OKTOBER 2019)	RUMAH DATA DHARMASRAYA	
344	NOMOR 69 TAHUN 2019 (10 OKTOBER 2019)	POLA TATA KELOLA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBAI KABUPATEN DHARMASRAYA	
345	NOMOR 71 TAHUN 2019 (10 OKTOBER 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 126 TAHUN 2017 TENTANG POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2017
346	NOMOR 80 TAHUN 2019 (20 NOVEMBER 2019)	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI SATU TAHUN PRASEKOLA DASAR DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
347	NOMOR 81 TAHUN 2019 (20 NOVEMBER 2019)	PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
348	NOMOR 83 TAHUN 2019 (9 DESEMBER 2019)	TATA CARA PELAKSANAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	
349	NOMOR 88 TAHUN 2019 (9 DESEMBER 2019)	KEBIJAKAN AKUNTANSI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
350	NOMOR 89 TAHUN 2019 (9 DESEMBER 2019)	PENGGUNAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
351	NOMOR 96 TAHUN 2019 (23 DESEMBER 2019)	TATA CARA PENUNJUKKAN PENGANGKATAN PELAKSANA HARIAN DAN PELAKSANA TUGAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
352	NOMOR 100 TAHUN 2019 (31 DESEMBER 2019)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA	
353	NOMOR 101 TAHUN 2019 (31 DESEMBER 2019)	KODE ETIK PENGADAAN BARANG/JASA	
354	NOMOR 103 TAHUN 2019 (31 DESEMBER 2019)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2017 Diubah beberapa kali dengan - Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2024 - Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025

TAHUN 2020			
355	NOMOR 3 TAHUN 2020 (24 JANUARI 2020)	PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 121 TAHUN 2017 TENTANG AKSI DAERAH PENGARUSUTAMAAN GENDER KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2020
356	NOMOR 5 TAHUN 2020 (30 MARET 2020)	PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
357	NOMOR 6 TAHUN 2020 (30 MARET 2020)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 110 TAHUN 2018 TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2018
358	NOMOR 9 TAHUN 2020 (23 APRIL 2020)	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 99 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2020	Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2019 Diubah beberapa kali dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2020, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2020
359	NOMOR 10 TAHUN 2020 (24 APRIL 2020)	STANDAR BIAYA PENANGULANGAN BENCANA WABAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN DHARMASRAYA	
360	NOMOR 11 TAHUN 2020 (12 MEI 2020)	PETUNJUK TEKNIS PEMERINTAHAN TUNJANGAN HARI RAYA KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
361	NOMOR 13 TAHUN 2020 (1 JULI 2020)	PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020

362	NOMOR 19 TAHUN 2020 (3 AGUSTUS 2020)	PENETAPAN NILAI PEROLEHAN AIR TANAH YANG DIGUNAKAN SEBAGAI DASAR PERHITUNGAN PAJAK AIR TANAH	
363	NOMOR 22 TAHUN 2020 (3 AGUSTUS 2020)	MEKANISME PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
364	NOMOR 24 TAHUN 2020 (27 AGUSTUS 2020)	PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN GAJI KETIGA BELAS TAHUN 2020 KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	
365	NOMOR 25 TAHUN 2020 (27 AGUSTUS 2020)	CUTI WALI NAGARI DAN PERANGKAT NAGARI	
366	NOMOR 30 TAHUN 2020 (1 SEPTEMBER 2020)	TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI NAGARI	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018
367	NOMOR 31 TAHUN 2020 (1 SEPTEMBER 2020)	TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH KABUPATEN DHARMASRAYA	
368	NOMOR 33 TAHUN 2020 (19 SEPTEMBER 2020)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020
369	NOMOR 34 TAHUN 2020 (19 SEPTEMBER 2020)	PEDOMAN PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2010

370	NOMOR 42 TAHUN 2020 (30 DESEMBER 2020)	PERUBAHAN ATAS PERAUTURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 115 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 115 Tahun 2018
371	NOMOR 46 TAHUN 2020 (30 DESEMBER 2020)	TATA CARA PENGADAAN BARANG DAN JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI RUMBIAI KABUPATEN DHARMASRAYA	
372	NOMOR 47 TAHUN 2020 (30 DESEMBER 2020)	KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024
373	NOMOR 49 TAHUN 2020 (30 DESEMBER 2020)	PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN	-
374	NOMOR 50 TAHUN 2020 (30 DESEMBER 2020)	PROSEDUR, MEKANISME DAN TEKNIS PERSYARATAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI	-
375	NOMOR 51 TAHUN 2020 (30 DESEMBER 2020)	NAGARI MANDIRI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MEMBAHAGIAKAN MASYARAKAT	-
TAHUN 2021			
376	NOMOR 3 TAHUN 2021 (15 MARET 2021)	PERATURAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG TARIF PELAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019
376	NOMOR 4 TAHUN 2021 (31 MARET 2021)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN STAF KHUSUS BUPATI)	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2019

378	NOMOR 8 TAHUN 2021 (6 MEI 2021)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 27 TAHUN 2019 TENTANG JADWAL RETENSI ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2019
379	NOMOR 9 TAHUN 2021 (6 MEI 2021)	TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN PERKOTAAN YANG SUDAH KADALUARSA	-
380	NOMOR 10 TAHUN 2021 (31 MEI 2021)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 37 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN ANGGARAN 2021	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2020
381	NOMOR 12 TAHUN 2021 (7 JULI 2021)	PENGELOLAAN ASET NAGARI	-
382	NOMOR 13 TAHUN 2021 (7 JULI 2021)	PEMBENTUKAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
383	NOMOR 15 TAHUN 2021 (12 AGUSTUS 2021)	PERUBAHAN ATAS PERATUTAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 14 TAHUN 2020 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASAYA TAHUN 2021	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2020
384	NOMOR 19 TAHUN 2021 (13 SEPTEMBER 2021)	PEDOMAN GRATIFIKASI PEMERINTAH DILINGKUNGAN KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016
385	NOMOR 20 TAHUN 2021 (15 SEPTEMBER 2021)	PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA (BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022 NOMOR 20)	-
386	NOMOR 22 TAHUN 2021 (24 SEPTEMBER 2021)	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	-
387	NOMOR 23 TAHUN 2021 (29 SEPTEMBER 2021)	PENCEGAHAN PERKAWINAN USIA ANAK	

388	NOMOR 24 TAHUN 2021 (29 SEPTEMBER 2021)	TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI HAK ATAS TANAH TRANSMIGRAN DIKABUPATEN DHARMASRAYA	-
389	NOMOR 28 TAHUN 2021 (29 NOVEMBER 2021)	PENETAPAN KAWASAN PERDESAAN DAN RENCANA PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN	-
390	NOMOR 29 TAHUN 2021 (29 NOVEMBER 2021)	PEDOMAN PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN DHARMASRAYA	-
391	NOMOR 31 TAHUN 2021 (27 DESEMBER 2021)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022
392	NOMOR 36 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	LINGKUNGAN	-
393	NOMOR 38 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	INDIKATOR KERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2021-2026	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2019
394	NOMOR 39 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	PENYUSUTAN BARANG MILIK DEARAH	<ul style="list-style-type: none"> - Mencabut Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 87 tahun 2019 - Dan diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2024
395	NOMOR 40 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	PEDOMAN PELAKSANAAN UJIAN DINAS DAN UJIAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
396	NOMOR 41 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI KABUPATEN DHARMASRAYA	-
397	NOMOR 42 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	PEDOMAN PENYELENGGARAAN PENERBITAN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG	-
398	NOMOR 43 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	SERTIFIKAT LAIK FUNGSI BANGUNAN GEDUNG	-
399	NOMOR 44 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-

400	NOMOR 45 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2019
401	NOMOR 46 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2019
402	NOMOR 47 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019
403	NOMOR 48 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019
404	NOMOR 50 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2016
405	NOMOR 51 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2016
406	NOMOR 52 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERBUDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2016 sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2019
407	NOMOR 53 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAN KEBAKARAN	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016
408	NOMOR 55 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2019
409	NOMOR 57 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2019

410	NOMOR 58 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2019
411	NOMOR 59 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2019
412	NOMOR 60 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2019
413	NOMOR 61 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2019
414	NOMOR 62 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PANGAN DAN PERIKANAN	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016
415	NOMOR 63 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016
416	NOMOR 64 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2016
417	NOMOR 66 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEUANGAN DAERAH	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2019
418	NOMOR 67 TAHUN 2021 (30 DESEMBER 2021)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2019
TAHUN 2022			
419	NOMOR 1 TAHUN 2022 (28 JANUARI 2022)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN POLA HIDUP PRODUKTIF DAN AMAN DALAM MASA PANDEMIC CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2020

420	NOMOR 3 TAHUN 2022 (28 JANUARI 2022)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 61 TAHUN 2019 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK HASIL PEMILIHAN LEGISLATIVE TAHUN 2019	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2019
421	NOMOR 8 TAHUN 2022 (28 APRIL 2022)	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2021
422	NOMOR 9 TAHUN 2022 (6 JUNI 2022)	PENYELENGGARAAN SATU DATA INDONESIA DIKABUPATEN DHARMASRAYA	-
423	NOMOR 10 TAHUN 2022 (6 JUNI 2022)	PENGEMBANGAN KOPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN PEMERINTAH DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 111 Tahun 2018
424	NOMOR 11 TAHUN 2022 (6 JUNI 2022)	TATA CARA PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PEANGKAT DAERAH DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
425	NOMOR 15 TAHUN 2022 (1 AGUSTUS 2022)	PENERAPAN SISTEM TRANSAKSI DAN PELAPORAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH SECARA ELEKTRONIK	-
426	NOMOR 17 TAHUN 2022 (26 AGUSTUS 2022)	SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSNA TEKNIS BALAI PELATIHAN KERJA SUNGAI DAREH PADA DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 117 Tahun 2017
427	NOMOR 18 TAHUN 2022 (12 SEPTEMBER 2022)	TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERATNAGGUNG JAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BANTUAN KEUANGAN	-
428	NOMOR 20 TAHUN 2022 (26 SEPTEMBER 2022)	TATA CARA PENGANGGARAN PELAKSANAAN DI PENATAUSAHAAN PELAPORAN DI PERTANGGUNGJAWABAN PEMERIAN HIBAH YANG BERSUMBER YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	

429	NOMOR 21 TAHUN 2022 (6 OKT 2022)	MANAJEMEN TALENTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
430	NOMOR 22 TAHUN 2022 (6 OKTOBER 2022)	POLA KARIR PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
431	NOMOR 24 TAHUN 2022 (24 OKTOBER 2022)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2018 TENTANG NILAI JUAL HASIL PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BANTUAN DI KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018
432	NOMOR 28 TAHUN 2022 (4 NOVEMBER 2022)	PENGENDALIAN KECURANGAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
433	NOMOR 29 TAHUN 2022 (4 NOVEMBER 2022)	TATA CARA PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
434	NOMOR 31 TAHUN 2022 (4 NOVEMBER 2022)	PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
435	NOMOR 33 TAHUN 2022 (26 DESEMBER 2022)	BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2022
436	NOMOR 34 TAHUN 2022 (26 DESEMBER 2022)	KAJIAN RISIKO BENCANA DI KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2022-2026	-
437	NOMOR 36 TAHUN 2022 (26 DESEMBER 2022)	PERAN NAGARI DALAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN DHARMASRAYA	-
438	NOMOR 38 TAHUN 2022 (29 DESEMBER 2022)	TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
439	NOMOR 40 TAHUN 2022 (29 DESEMBER 2022)	PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-

440	NOMOR 41 TAHUN 2022 (21 DES 2022)	PENCABUATAN PERATURAN BUPATI MENGENAI ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	- Mencabut Peraturan Bupati Nomor 55-110 Tahun 2017 - Mencabut Peraturan Bupati Nomor 47-109 Tahun 2018
441	NOMOR 45 TAHUN 2022 (28 DESEMBER 2022)	TARIF LAYANAN PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH YANG MENERAPKAN POLA PENGELOLAAN KEUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH	-
442	NOMOR 46 TAHUN 2022 (28 DESEMBER 2022)	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP STATIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
443	NOMOR 47 TAHUN 2022 (28 DESEMBER 2022)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 28 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENYUSUTAN ARSIP DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
444	NOMOR 48 TAHUN 2022 (28 DESEMBER 2022)	PEDOMAN PEMELIHARAAN ARSIP DINAMIS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
445	NOMOR 49 TAHUN 2022 (28 DESEMBER 2022)	TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2016
446	NOMOR 50 TAHUN 2022 (28 DESEMBER 2022)	PENYERAPAN INOVASI DAERAH PADA BADAN KEUNGAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
447	NOMOR 51 TAHUN 2022 (28 DESEMBER 2022)	PEDOMAN PENGELOLAAN ARSIP TERJAGA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
TAHUN 2023			
448	NOMOR 1 TAHUN 2023 (2 JANUARI 2023)	TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2021, sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021, Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2022, dan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2022

449	NOMOR 2 TAHUN 2023 (16 JANUARI 2023)	KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2019
450	NOMOR 4 TAHUN 2023 (13 APRIL 2023)	PENGELOLAAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH	-
451	NOMOR 5 TAHUN 2023 (8 MEI 2023)	PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING	-
452	NOMOR 7 TAHUN 2023 (12 JUNI 2023)	PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH	-
453	NOMOR 12 TAHUN 2023 (3 JULI 2023)	PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 98 Tahun 2019
454	NOMOR 18 TAHUN 2023 (29 DESEMBER 2023)	KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2021
455	NOMOR 19 TAHUN 2023 (29 DESEMBER 2023)	KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SETA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRASMIGRASI	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2021
456	NOMOR 20 TAHUN 2023 (29 DESEMBER 2023)	KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN RISET DAN INOVASI DAERAH	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2021
457	NOMOR 21 TAHUN 2023 (29 DESEMBER 2023)	KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KESEHATAN	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2021
458	NOMOR 22 TAHUN 2023 (29 DESEMBER 2023)	PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SUNGAI DAREH PADA DINAS KESEHATAN	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 89 Tahun 2011
459	NOMOR 25 TAHUN 2023 (29 DESEMBER 2023)	TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU BAGI PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN	-
460	NOMOR 28 TAHUN 2023 (29 DESEMBER 2023)	PENCABUTAN PERATURAN BUPATI NOMOR 42 TAHUN 2022 TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DHARMASRAYA TAHUN 2022-2025	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2022

461	NOMOR 29 TAHUN 2023 (29 DESEMBER 2023)	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN	-
462	NOMOR 30 TAHUN 2023 (29 DESEMBER 2023)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 69 TAHUN 2021 TENTANG PENERAPAN INOVASI DAERAH PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2021
TAHUN 2024			
463	NOMOR 1 TAHUN 2024 (15 JANUARI 2024)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2020 TENTANG KELAS JABATAN DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020
464	NOMOR 2 TAHUN 2024 (29 FEBRUARI 2024)	TATA CARA PENGGUNAAN DAN PENYELENGGARAAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH UNTUK PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	-
465	NOMOR 7 TAHUN 2024 (30 MEI 2024)	PERLINDUNGAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA PERKEBUNAN SAWIT	-
466	NOMOR 8 TAHUN 2024 (19 JUNI 2024)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 39 TAHUN 2021 TENTANG PENYUSUTAN BARANG MILIK DAERAH	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021
467	NOMOR 9 TAHUN 2024 (19 JUNI 2024)	PEDOMAN PENYUSUUNAN PERJANJIAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA, DAN TATA CARA REVIU ATAS LAPORAN KINERJA PEMERINTAHAN DAERAH	Mencabut Peraturaan Bupati Nomor 10 Tahun 2017
468	NOMOR 10 TAHUN 2024 (19 JUNI 2024)	SISTEM KERJA DILINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH	-
469	NOMOR 16 TAHUN 2024 (31 OKTOBER 2024)	STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
470	NOMOR 17 TAHUN 2024 (31 OKTOBER 2024)	POLA TATA KELOLA UNIT PELAKSA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM DAERAH	-
471	NOMOR 18 TAHUN 2024 (31 OKTOBER 2024)	RENCANA STRATEGIS UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH LABORATORIUM KESEHATAN KABUPATEN DHARMASRAYA	-
472	NOMOR 21 TAHUN 2024 (9 OKTOBER 2024)	KEDUDUKAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA STAF AHLI	Mencabut Ketentuan Yang Mengatur Staf Ahli pada Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2021

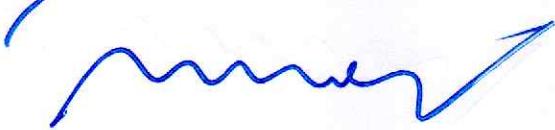
473	NOMOR 22 TAHUN 2024 (27 DESEMBER 2024)	PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BEPENGHASILAN RENDAH	-
474	NOMOR 23 TAHUN 2024 (27 DESEMBER 2024)	PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH	-
475	NOMOR 28 TAHUN 2024 (30 DESEMBER 2024)	ANALISIS STANDAR BIAYA PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA	-
476	NOMOR 29 TAHUN 2024 (30 DESEMBER 2024)	PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019
477	NOMOR 30 TAHUN 2024 (30 DESEMBER 2024)	KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	Diubah Dengan Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2025
478	NOMOR 28 TAHUN 2024 (30 DESEMBER 2024)	SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	-

TAHUN 2025

479	NOMOR 7 TAHUN 2025 (15 JULI 2025)	RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025-2029	-
480	NOMOR 9 TAHUN 2025 (24 JULI 2025)	RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2026	-
481	NOMOR 10 TAHUN 2025 (28 AGUSTUS 2025)	PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN	-
482	NOMOR 14 TAHUN 2025 (23 DESEMBER 2025)	PEMBENTUKAN KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PADA DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	-
483	NOMOR 16 TAHUN 2025 (30 DESEMBER 2025)	PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 30 TAHUN 2024 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH	Mengubah Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024
484	NOMOR 17 TAHUN 2025 (30 DESEMBER 2025)	STANDAR HARGA SATUAN	-

485	NOMOR 18 TAHUN 2025 (31 DESEMBER 2025)	PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2026	
486	NOMOR 19 TAHUN 2025 (30 DESEMBER 2025)	PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA NOMOR 50 TAHUN 2017 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA	Mengubah beberapa kali: - Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2019 - Peraturan Bupati Nomor 29 Taun 2024 - Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2025
487	NOMOR 19 TAHUN 2025 (30 DESEMBER 2025)	PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH	
488	NOMOR 21 TAHUN 2025 (31 DESEMBER 2025)	PENYESUIAN DETAIL RINCIAN OBJEK RETRIBUSI LAYANAN KESEHATAN	
489	NOMOR 22 TAHUN 2025 (31 DESEMBER 2025)	TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA NAGARI	Mencabut Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018

Pulau Punjung, Januari 2026
 Pj. SEKRETARIS DAERAH,



JASMAN



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
Jl. Lintas Sumatera Km. 04 Sungai Dareh
Telp. 0754-451488, Fax. 0754-451488 Pulau Punjung (27573)

Pulau Punjung, 15 Januari 2026 M

25 Rajab 1447 H

Nomor : 800.1.9.1 / 152/ BKPSDM – 2026
Sifat : Biasa
Lamp : -
Perihal : **Penyampaian Data**

Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
Cq. Kepala Bagian Organisasi

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor : 000.8.5 / 52 /Setda-Org/I-2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Permintaan Data, maka bersama ini kami sampaikan data jumlah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya sebagai berikut:

1. Jumlah CPNS	=	98
2. Jumlah PNS	=	2.878
3. Jumlah PPPK	=	2.034
4. Jumlah PPPK Paruh Waktu	=	<u>1.316</u>
Total ASN	=	6.326

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

**Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KAB. DHARMASRAYA**



Ummu Azizah, S.Psi, MM
NIP: 19850422 200902 2 005

Tembusan :

1. Bupati Dharmasraya sebagai laporan.
2. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung



PEMERINTAH KABUPATEN DHARMASRAYA
BADAN KEUANGAN DAERAH

Jl. Lubuk Sumatera Km. 2 Pulau Punjung Sumatera Barat
Telp 0754-401161 Fax 0754-401161
www.dharmasrayakab.go.id

Pulau Punjung, 16 Januari 2026 M
26 Rajab 1447 H

Nomor : 900.1.1/1/ji /BKDA/2026
Sifat : Pertinggi
Lampiran : 1 (Satu)
Hal : Penyampaikan Data Jumlah APBD TA. 2026

Kepada

Yth Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Dharmasraya
Co. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
di -

Tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah Nomor: 000.8.5/ 52/Setda-Org/I-2026 tanggal 14 Januari 2026 perihal Permintaan Data yaitu terkait Jumlah APBD Tahun Anggaran 2026.

Berkenaan dengan hal di atas, dapat kami sampaikan bahwa APBD Kabupaten Dharmasraya Tahun Anggaran 2026 adalah sebesar Rp1.032.845.576.718,70 (Ringkasan APBD Tahun Anggaran 2026 terlampir).

Demikian data ini sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terimakasih.



Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Ibu Bupati Dharmasraya di Pulau Punjung.
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Dharmasraya di Pulau Punjung.



KABUPATEN DHARMASRAYA

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2026

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	156.588.553.694,00
4.1.01	Pajak Daerah	68.560.857.006,00
4.1.02	Retribusi Daerah	78.053.477.219,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.529.319.469,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	4.444.900.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	758.938.426.720,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	719.203.333.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	39.735.093.720,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	12.848.601.595,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	100.000.000,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12.748.601.595,00
	Jumlah Pendapatan	928.375.582.009,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	844.543.547.825,70
5.1.01	Belanja Pegawai	539.912.119.586,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	292.791.162.954,70
5.1.05	Belanja Hibah	11.785.265.285,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	55.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	75.095.072.893,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	17.397.051.997,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.455.114.660,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	35.408.306.336,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.382.099.900,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	452.500.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	108.208.956.000,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	7.670.507.000,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	100.536.449.000,00
	Jumlah Belanja	1.032.845.578.718,70

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
	Total Surplus/(Defisit)	-104.469.994.709,70
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	105.969.994.709,70
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	105.969.994.709,70
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	1.500.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	1.500.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembayaran	105.969.994.709,70
	Jumlah Pengeluaran Pembayaran	1.500.000.000,00
	Pembayaran Netto	104.469.994.709,70
6.3	Sisa Lebih Pembayaran Anggaran Daerah Tahun Berkalaan (SILPA)	0,00

Kab. Dharmasraya, 31 Desember 2025

Bupati

ANNISA SUCI RAMADHANI